



Kinerja BPOM

Dalam Angka

Triwulan IV Tahun 2024



KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN IV TAHUN 2024

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi pre-market, hingga pengawasan post-market yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 216.256 NIE, pemeriksaan terhadap 40.290 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 80.502 sampel, 282 perkara, dan 498 kegiatan pelaksanaan KIE.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 25 Februari 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	11
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman	15
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	19
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	21
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	23
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik	33
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	37
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	41
BAB 10 Kerjasama Internasional	45
BAB 11 Sumber Daya Manusia	47
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan Desember 2024	53
BAB 13 Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	55
Penutup	55
Lampiran	56

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan.....	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	6
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	9
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	9
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	10
Gambar 8.	Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	11
Gambar 9.	Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan IV Tahun 2024	12
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	13
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan	14
	Seluruh Indonesia s.d. Triwulan IV Tahun 2024.....	14
Gambar 12.	Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan IV Tahun 2024.....	23
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan IV tahun 2024.....	23
Gambar 14.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024	24
Gambar 16.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	25
Gambar 15.	Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	25
Gambar 17.	Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	26
Gambar 19.	Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan IV Tahun 2024.....	27
Gambar 18.	Engagement Per Platform s.d Triwulan IV Tahun 2024	27
Gambar 21.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024	28
Gambar 20.	Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.2/2024	28
Gambar 22.	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan IV Tahun 2024.....	29
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi.....	30
Gambar 24.	Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	30
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	31
Gambar 26.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	31
Gambar 27.	Tampilan BPOM Mobile dengan 4 Menu Baru	33
Gambar 28.	Dashboard Data Pengawasan Obat dan Makanan pada Aplikasi SIPT	35
Gambar 29.	Dashboard Data dan Pengaduan pada Layanan Helpdesk Pusdatin	36
Gambar 30.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan IV Tahun 2024	39
Gambar 31.	Alur Pengusulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Badan POM.....	42
Gambar 32.	Kepala Badan POM Selaku Manajemen Puncak Menyerahkan Secara Simbolis Sertifikat ISO 9001:2015 Badan POM kepada Sekretaris Utama.....	44
Gambar 33.	Virtual Technical Meeting antara Badan POM dengan WHO dalam Rangka WLA	45
Gambar 34.	Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan POM dan Kementerian BUMN	46
Gambar 35.	Realisasi Anggaran s.d Desember 2024.....	53

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	8
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping	10
Tabel 4. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan IV Tahun 2024	47
Tabel 5. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan IV Tahun 2024	48
Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan IV Tahun 2024	49
Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi CMC s.d. Triwulan IV Tahun 2024	51
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan IV Tahun 2024	52
Tabel 9. Hasil Monitoring Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIASN s.d. Triwulan IV Tahun 2024	52

Highlight

BPOM Dorong Penguatan UMKM Pangan Steril



Yogyakarta - Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi pangan olahan nusantara dengan tahap sterilisasi pada proses produksinya, BPOM menggelar Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial yang diselenggarakan pada Selasa (22/10/2024). Pangan olahan yang dimaksud seperti gudeg, rendang, empal gentong, sate rembiga, dan pempek dalam kemasan kaleng atau pouch. Untuk memastikan produk tetap aman dan berkualitas, BPOM mewajibkan penggunaan teknologi sterilisasi komersial.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pangan steril komersial memainkan peran penting dalam menjaga kualitas pangan olahan Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. “Perlu dipahami bahwa ada risiko keamanan pangan yang tinggi, jika proses sterilisasi komersial tidak dilakukan dengan sempurna,” terang Taruna Ikrar dalam sambutannya saat membuka forum koordinasi.

Kolaborasi BPOM-KCI Bangun Literasi Obat dan Makanan Aman bagi Pengguna Commuter Line



Jakarta - BPOM bersama PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) berkolaborasi melakukan seremonial launching kampanye edukasi KataBPOM: Commuters Cerdas, Pilih Obat dan Makanan Aman pada Senin (4/11/2024). Bertempat di Hall Pintu Selatan Stasiun Juanda Jakarta, launching dihadiri dan dilakukan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Rangkaian Kampanye KataBPOM ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM, jajaran direksi PT KCI, beserta rekan-rekan media massa. “KataBPOM” merupakan salah satu bentuk kampanye yang tengah diusung BPOM. Tujuan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan aman dari sumber dan informasi yang valid dan terpercaya. Kali ini, kampanye menyasar kepada pengguna commuter line sebagai salah satu sarana transportasi di Indonesia dengan jumlah pengguna yang tinggi. Rata-rata volume pengguna commuter line mencapai 961.051 orang per hari pada hari kerja dan sebanyak 709.730 orang per hari pada akhir pekan.

Kepala BPOM Musnahkan Miliaran Rupiah Barang Bukti Obat-Obat Tertentu Ilegal



Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengadakan konferensi pers bersama di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (11/12/2024). Konferensi pers ini menunjukkan komitmen bersama antara BPOM dan Kejaksaan Agung dalam memperkuat langkah penindakan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan. “Kejaksaan Agung dan BPOM memiliki visi dan semangat yang sama dalam melindungi masyarakat dari berbagai upaya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang obat dan makanan,” ujar Taruna Ikrar lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya tentang penguatan dan sinergitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di BPOM.



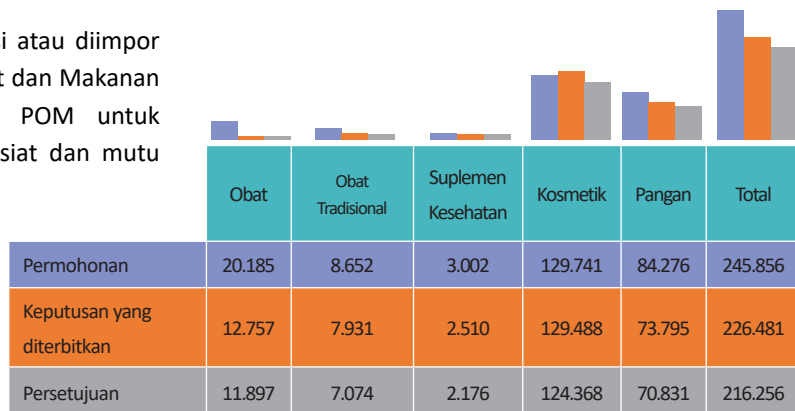
BAB 1

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

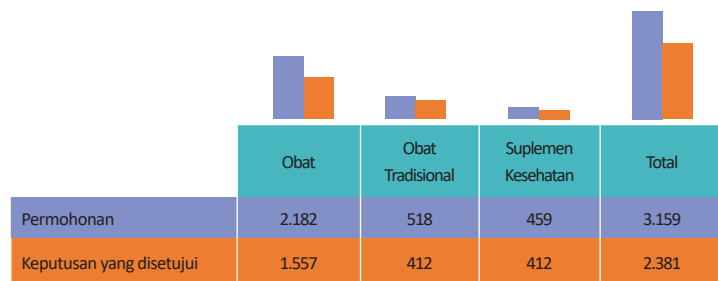
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, telah diterbitkan 226.481 keputusan dan 216.256 persetujuan izin edar dari 245.856 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dari 3.159 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.381 (75,37%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

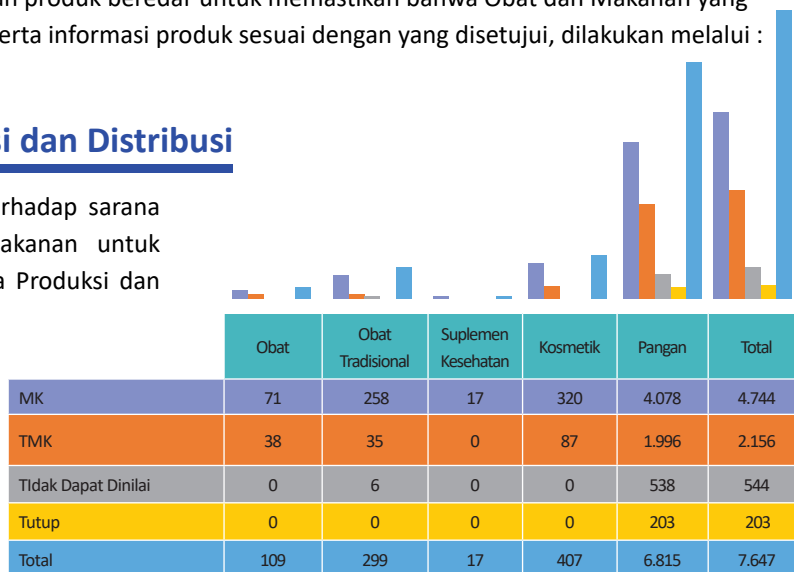
Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

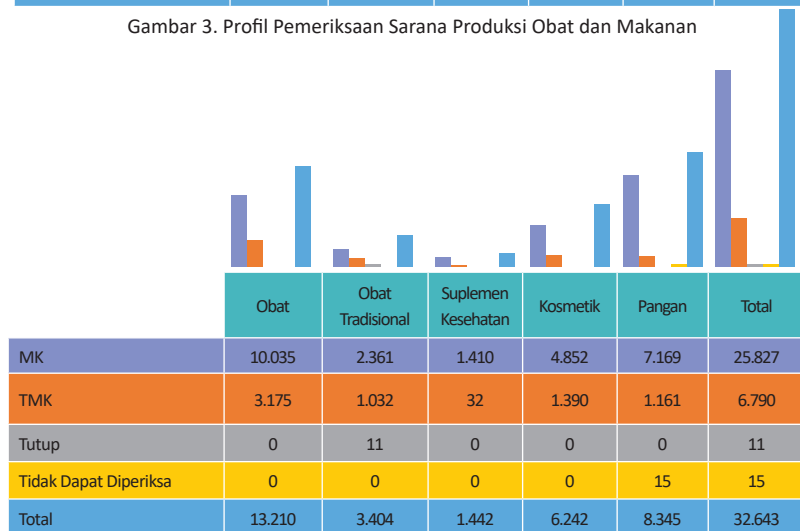
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 7.647 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 2.156 (28,19%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 32.643 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 6.790 (20,80%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan
TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a0b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d0e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	3.434	2	0	0	49	3.432	3.392	3.269	123	125	40	3.394
Obat Tradisional	Tageted	3.791	1	0	5	164	3.785	3.748	3.354	394	400	37	3.754
Kuasi	Tageted	263	0	0	1	5	262	260	253	7	8	2	261
Suplemen Kesehatan	Tageted	1.034	0	0	3	14	1.031	1.024	966	58	61	7	1.027
Kosmetik	Tageted	7.502	29	0	5	568	7.468	7.349	6.694	655	689	119	7.383
Rokok	Tageted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pangan	Tageted	5.249	4	0	3	650	5.242	4.949	4.346	603	610	293	4.956

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan IV 2024

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dari 21.273 sampel *targeted* yang disampling terdapat 20.775 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, Dimana 1.893 (9,11%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa izin Edar

b. Random

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a0b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d0e)	(j=b+e)
Obat	Random	13.625	0	0	5	263	13.620	13.542	13236	306	311	78	13.547
Obat Tradisional	Random	8.827	0	0	9	382	8.818	8.743	7946	797	806	75	8.752
Kuasi	Random	621	0	0	0	8	621	608	592	16	16	13	608
Suplemen Kesehatan	Random	2.407	0	0	5	42	2.402	2.380	2194	186	191	22	2.385
Kosmetik	Random	17.537	1	0	8	994	17.528	17.230	16225	1.005	1.014	298	17.239
Pangan	Random	17.847	0	0	10	711	17.837	17.277	15639	1.638	1.648	560	17.287

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)
BB/BPOM Triwulan IV 2024

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dari 60.864 sampel *random* yang disampling terdapat 59.818 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 3.986 (6,66%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

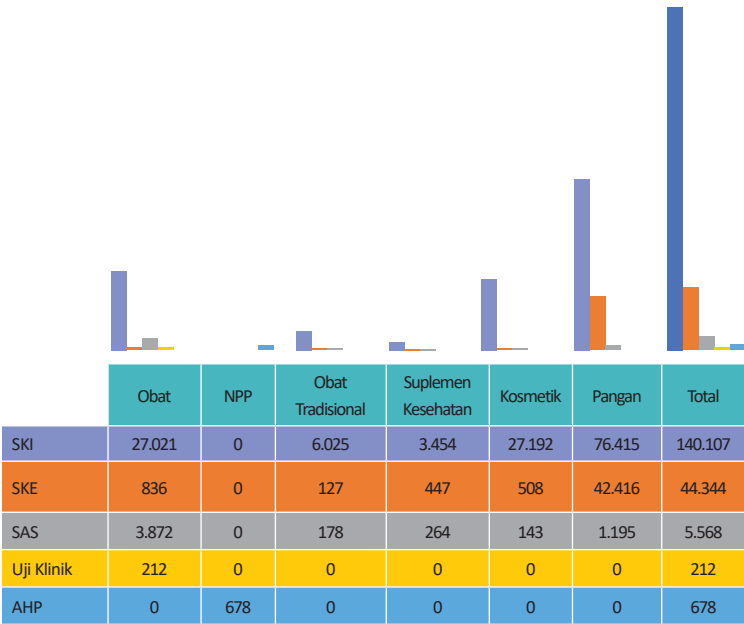
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 telah diterbitkan 140.107 SKI, 44.334 SKE, 5.652 SAS, 212 Uji Klinik, dan 678 AHP Obat dan Makanan.

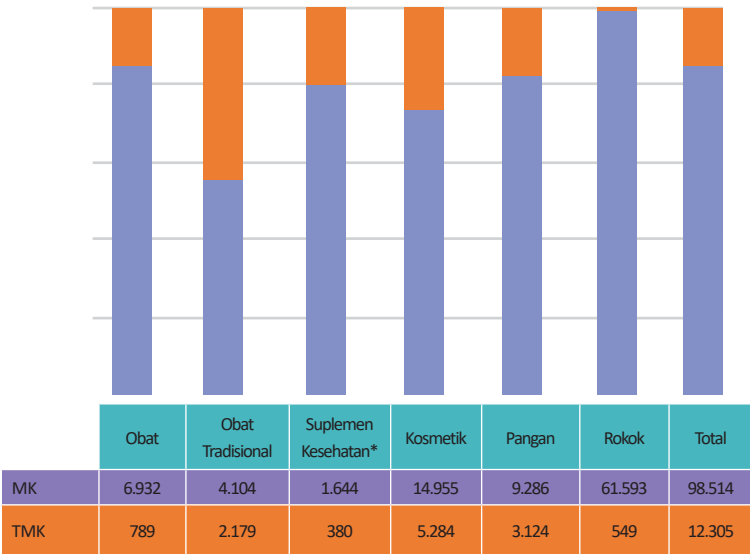


Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dari 110.819 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 12.305 (11,10%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi

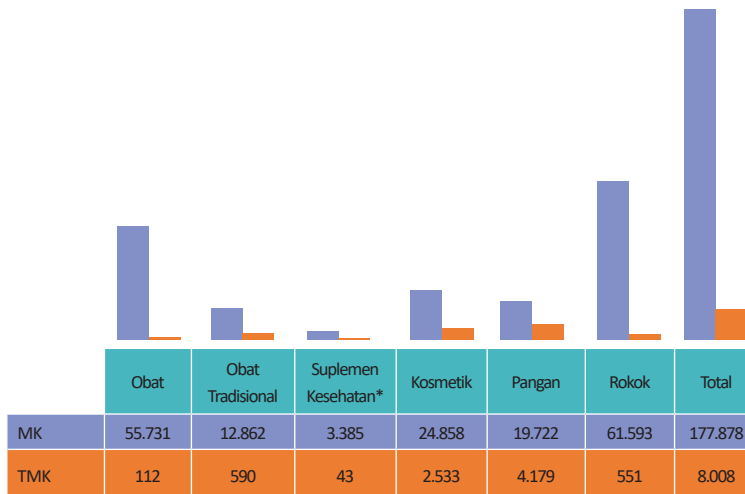


Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dari 185.886 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 8.008 atau sekitar 4,31% label tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanlanjut	%
Obat	13.238	10.625	80,26
Obat Tradisional	25	25	100,00
Suplemen Kesehatan	38	38	100,00
Kosmetik	747	730	97,72



Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

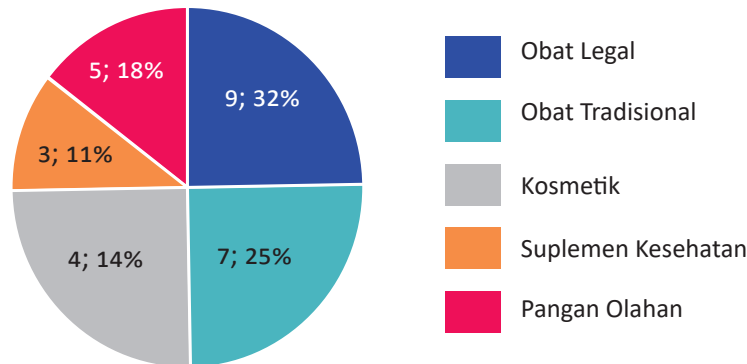


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 5.654 kasus yang terdiri dari 1.646 kasus terkait obat, 1.910 kasus terkait obat tradisional, 156 kasus suplemen kesehatan, 818 kasus terkait kosmetik dan 1.124 kasus terkait komoditi pangan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *projusticia*.

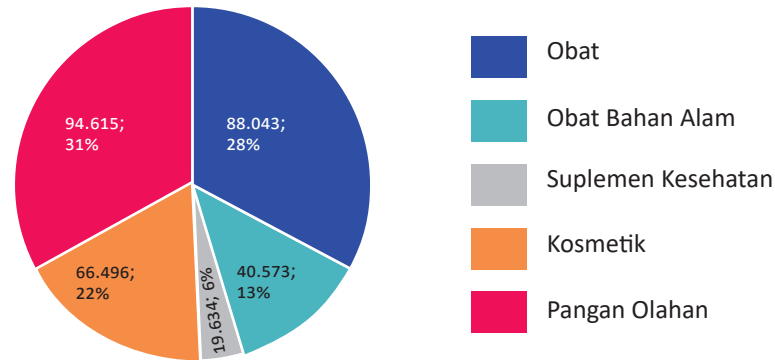


Gambar 9. Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan IV Tahun 2024

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, telah disusun 237 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 29 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 28 rekomendasi intelijen dengan 9 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 7 rekomendasi terkait kasus obat tradisional ilegal, 4 rekomendasi kasus kosmetik ilegal, 3 rekomendasi kasus suplemen kesehatan serta 5 rekomendasi terkait kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024

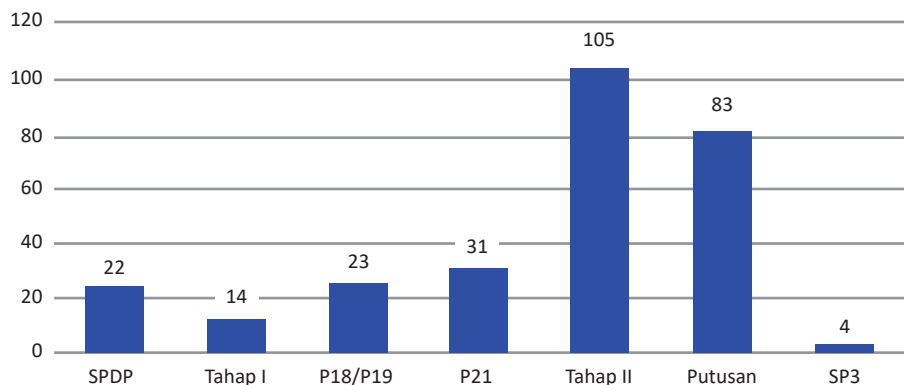
Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan IV tahun 2024, ditemukan 309.361 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 282 perkara. Sebanyak 22 perkara masih dalam tahap SPDP, 14 perkara pada tahap I, 23 perkara pada tahap P18/P19, 31 perkara pada tahap P21, 105 perkara pada tahap II, 83 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan, dan 4 perkara pada tahap SP3.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan IV Tahun 2024



BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2024, terdapat 17 peraturan/standar/pedoman yang disusun oleh Badan POM. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia (100%).
2. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2015 tentang Obat Pengembangan Baru (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin (100%).
4. Revisi Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (100%).
5. Revisi Peraturan Badan POM No. 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme) (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (substansi revisi Aneks 1 Pembuatan Produk Steril) (100%).
7. Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (100%).
8. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Kajian Risiko Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat (100%).
9. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat (100%).
10. Standard Mutu Obat Baru (100%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Pusat Farmakovigilans/Monitoring Efek Samping Obat Nasional (100%).
12. Pedoman atau Petunjuk Teknis Rekognisi Laboratorium Penyedia Jasa Pengujian Obat dan Bahan Obat (100%).
13. Rancangan Keputusan Badan POM tentang Standar Informasi Obat (100%).

14. Revisi Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit (100%).
15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi (100%).
16. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (100%).
17. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (100%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Fasilitas Industri Obat Bahan Alam (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Kajian Risiko terhadap Bahan Tambahan yang Digunakan dalam Sediaan Tertentu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (100%).
4. Revisi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (100%).
5. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (100%).
6. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (100%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Klinik (100%).
8. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (100%).
9. Revisi Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika (100%).
10. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (100%).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah diselesaikan 180 kajian dengan 178 kajian diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi *Emerging Issue* melalui Penelaahan Regulasi Cemaran Pangan Olahan di Berbagai Negara (100%).
2. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot (100%).
3. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (100%).
4. Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM terkait Kemasan Pangan (100%).
5. Amandemen Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (100%).
6. Revisi Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi (100%).
7. Revisi Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (100%).
8. Amandemen Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (100%).
9. Amandemen Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (100%).
10. Revisi Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (100%).
11. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (100%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah diselesaikan 215 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

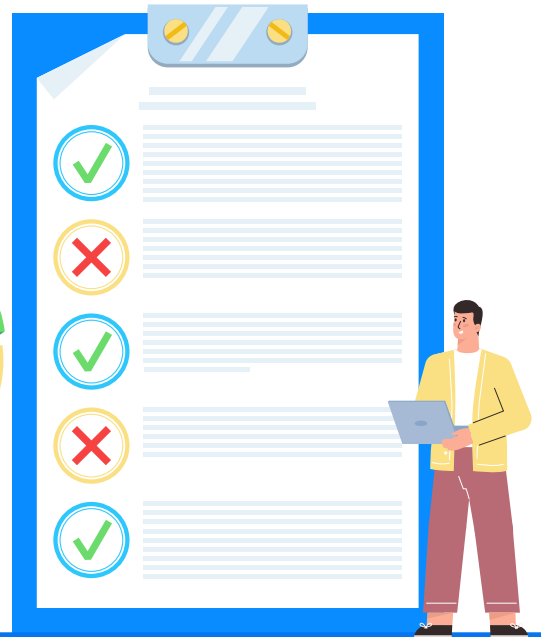


BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2024 terdapat 7 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (100%).
2. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) (100%).
3. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 (100%).
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Badan POM Tahun 2024 (100%).
5. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 (100%).
6. Analisis Efektivitas Implementasi Konsep Regionalisasi Laboratorium Badan POM (100%).
7. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025 (100%).



BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah dikembangkan 210 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah dikembangkan 130 baku pembanding.

3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

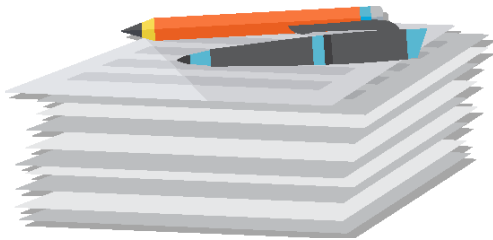
Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, terdapat 2.301 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*..

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, telah dilakukan kalibrasi terhadap 3.538 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

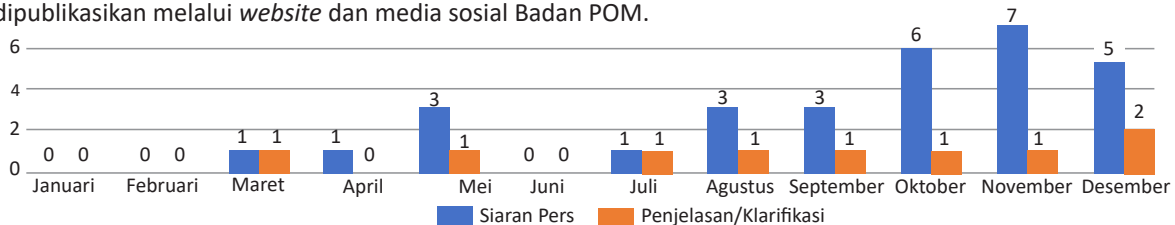
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2024, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 14 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Badan POM telah berpartisipasi dalam 15 jejaring laboratorium..



BAB 6

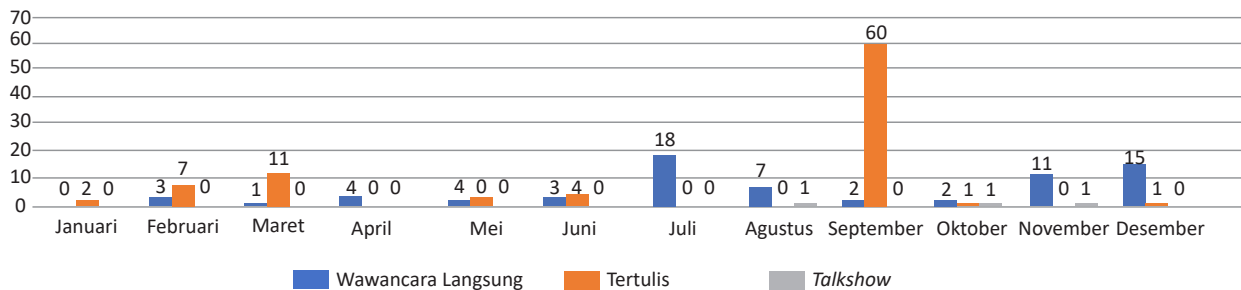
Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan 30 siaran pers dan 9 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



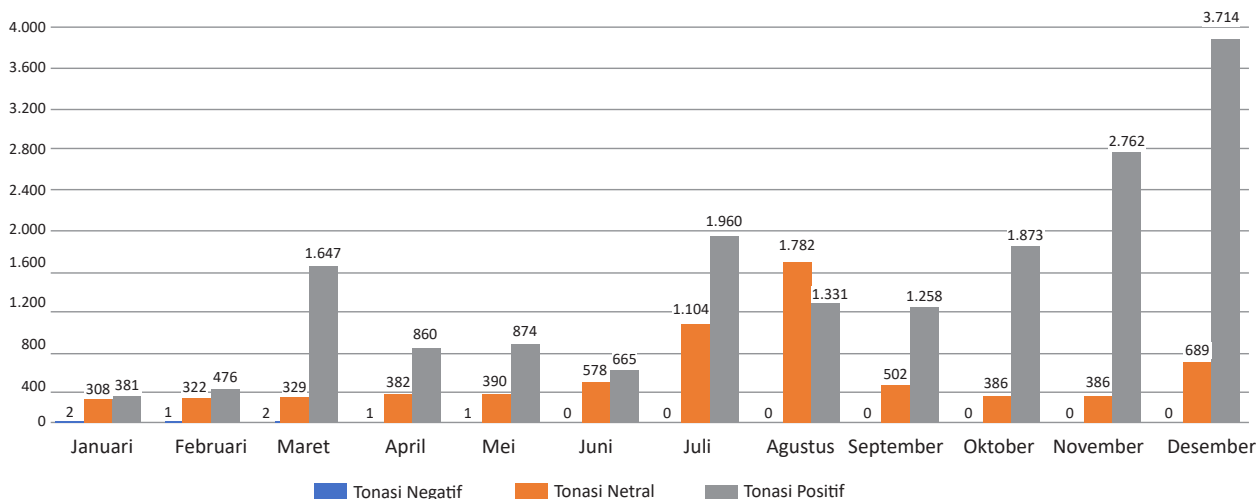
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan IV Tahun 2024

BBadan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Badan POM menerima 195 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 156 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 32 wawancara langsung, 122 jawaban tertulis, dan 2 *talkshow*.



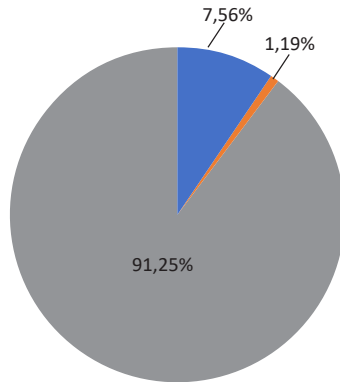
Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan IV tahun 2024

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, terdapat 24.969 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 71,28% bertonasi positif (17.798 berita), 28,68% bertonasi netral (7.161 berita), dan 0,04% bertonasi negatif (10 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.

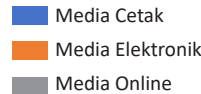


Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024

Tingginya pemberitaan positif pada bulan November disebabkan pemberitaan penarikan 6 produk *skincare* berbahan merkuri dari pasaran oleh BBPOM di Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan sementara pada bulan Desember terdapat pemberitaan terkait kerja sama antara Kementerian BUMN dengan Badan POM untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM pada skala global.



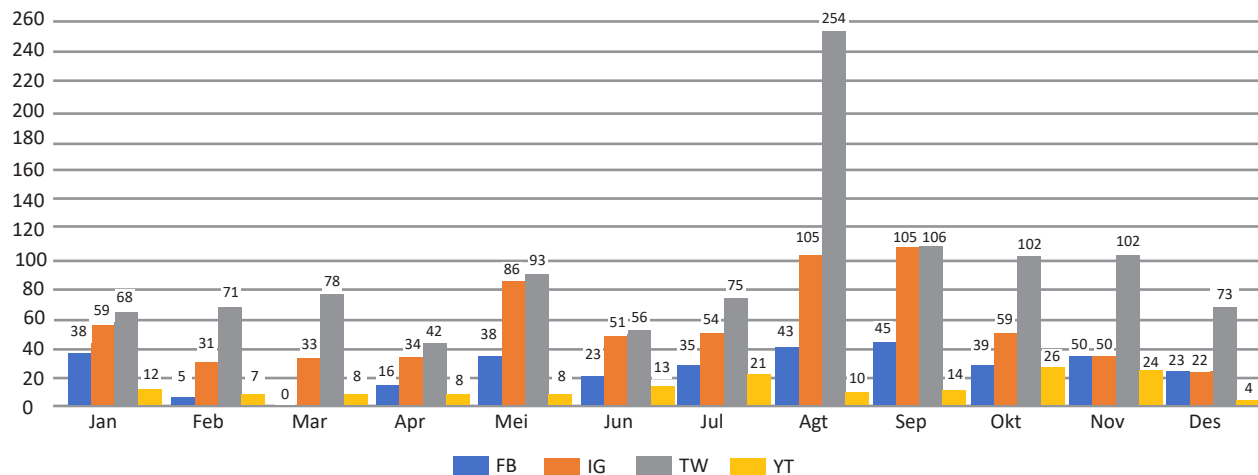
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 91,25% (22.783 berita), sedangkan media cetak sebesar 7,56% (1.888 berita) dan media elektronik sebesar 1,19% (298 berita).



Gambar 15. Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan IV Tahun 2024

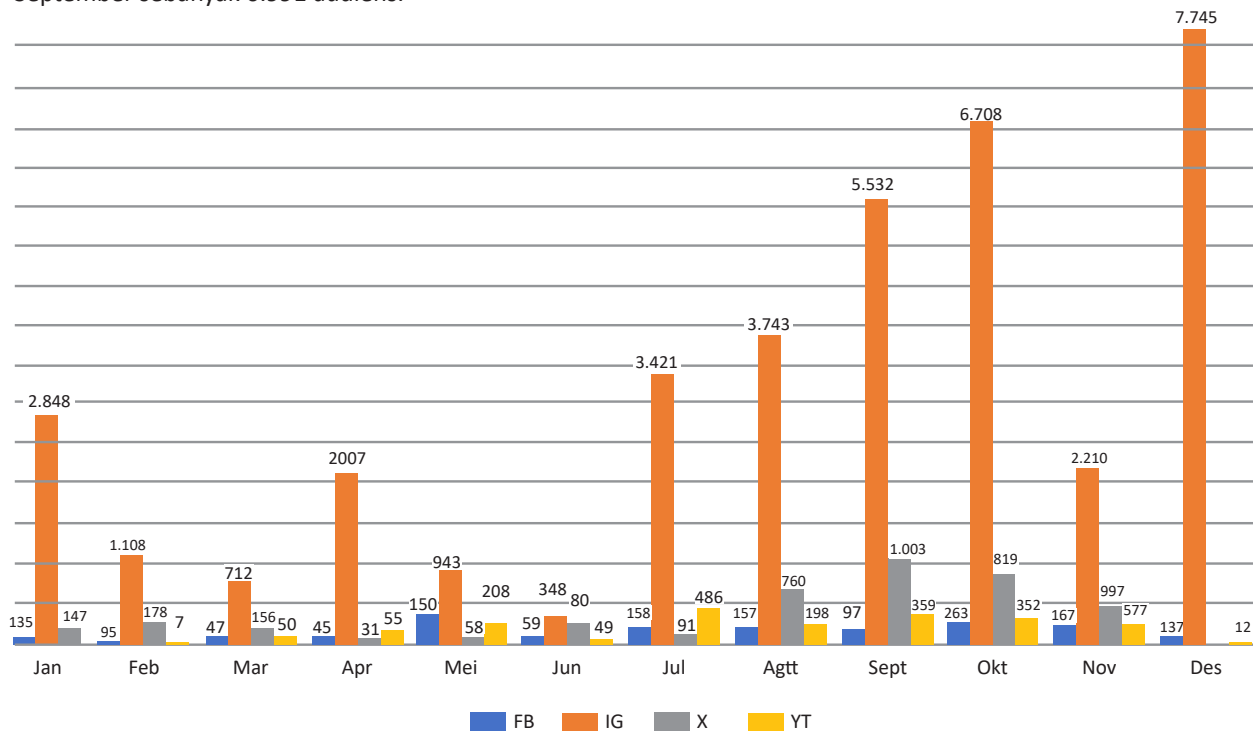
Pada triwulan IV tahun 2024, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X atau Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata 3-4 unggahan per hari. *Platform* X atau Twitter merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 277 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 131 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 112 unggahan, serta Youtube sebanyak 54 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan IV pada berbagai *platform* adalah 574 konten, dengan rincian 226 unggahan di bulan Oktober, 226 unggahan di bulan November, dan 122 unggahan di bulan Desember. Rincian jumlah unggahan sampai dengan triwulan IV di berbagai *platform* sebagai berikut:



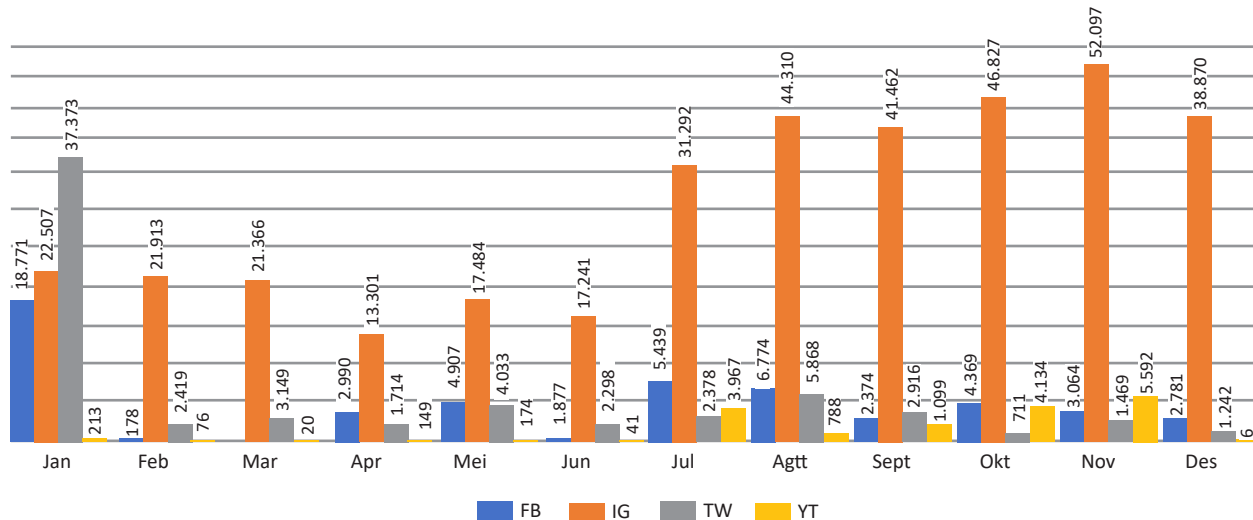
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan IV Tahun 2024

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan IV terhadap 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan *platform* dengan total audiens tertinggi pada triwulan IV ini dengan jumlah 16.663 audiens, sementara di peringkat kedua *platform* X atau Twitter dengan jumlah 1.816 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 941 audiens, dan Facebook dengan 567 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 8.142 audiens, disusul bulan Desember sebanyak 7.894 audiens dan bulan September sebanyak 6.991 audiens.



Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan IV Tahun 2024

Pada triwulan IV, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan November dengan jumlah 62.222, diikuti bulan Oktober sejumlah 56.041, dan bulan Desember sebesar 42.899. Pertumbuhan jumlah *engagement* sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 18. *Engagement* Per *Platform* s.d Triwulan IV Tahun 2024

Top engagement content terkait Badan POM di keempat *platform* pada triwulan IV dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. *Top Engagement Content* terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan IV Tahun 2024

Pada triwulan IV tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.6/No.2/2024 dengan mengusung tema utama Sehatkan Negeri Bersama Jamu. Tema ini dipilih untuk memaknai sejarah dan perkembangan tentang jamu sebagai warisan budaya. Dalam rubrik Ruang Utama ditulis dengan apik cerita tentang nasib jamu dari masa lalu ke masa depan, hingga pengawasan dan dukungan BPOM terhadap pengembangan produk herbal.

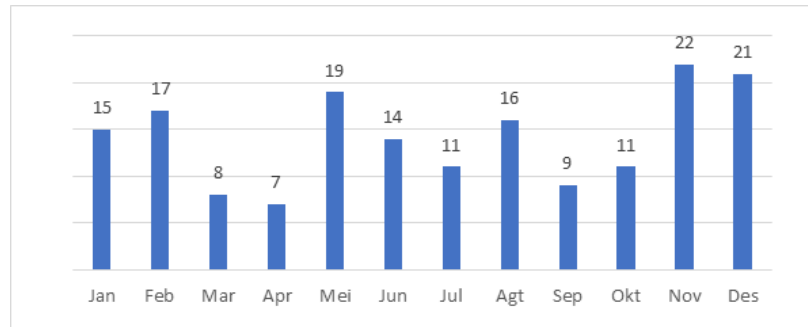


Gambar 20. Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.2/2024



Gambar 21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan IV Tahun 2024

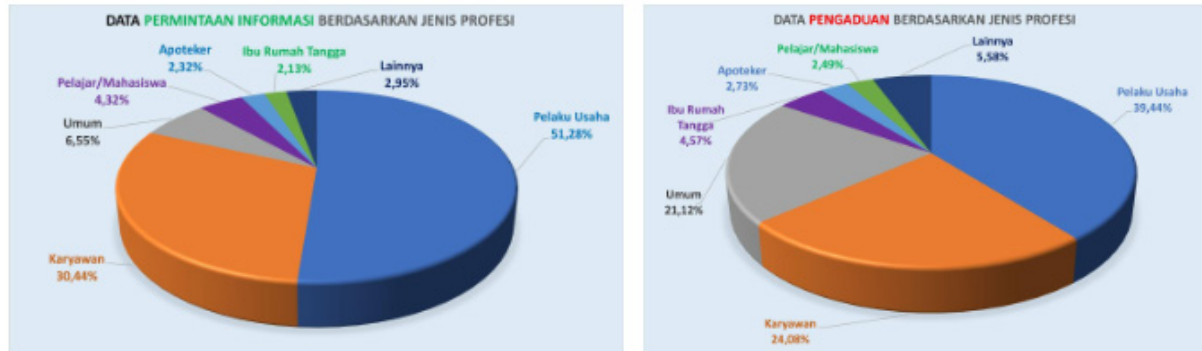
Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 170 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (79,41%), karyawan (9,41%), PNS/TNI/Polri (2,35%), apoteker (1,76%), LSM (1,18%), pelaku usaha (0,59%), sarjana hukum (0,59%), dan masyarakat umum lainnya (4,71%).



Gambar 22. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan IV Tahun 2024

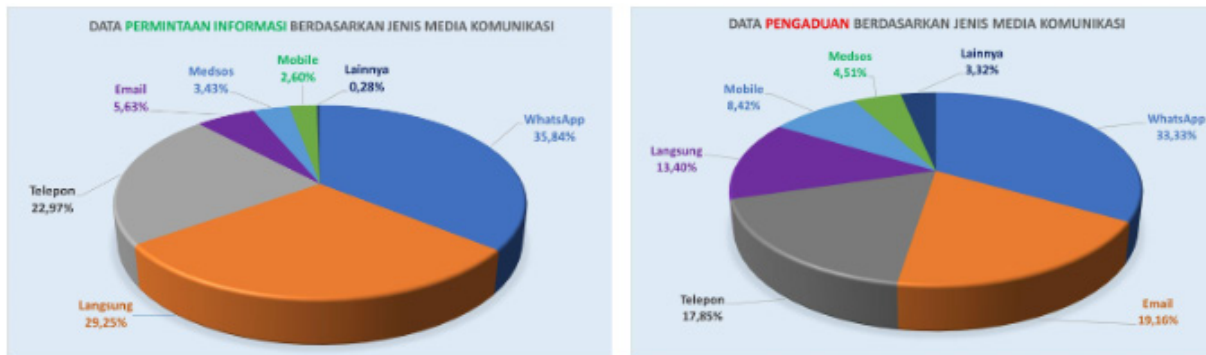
Dari 170 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 145 (85,29%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 12 (7,06%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 13 (7,65%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,98 hari kerja.

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat Obat dan Makanan sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 76 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 50.485 layanan, terdiri dari 48.799 (96,66%) layanan permintaan informasi dan 1.686 (3,34%) layanan pengaduan.



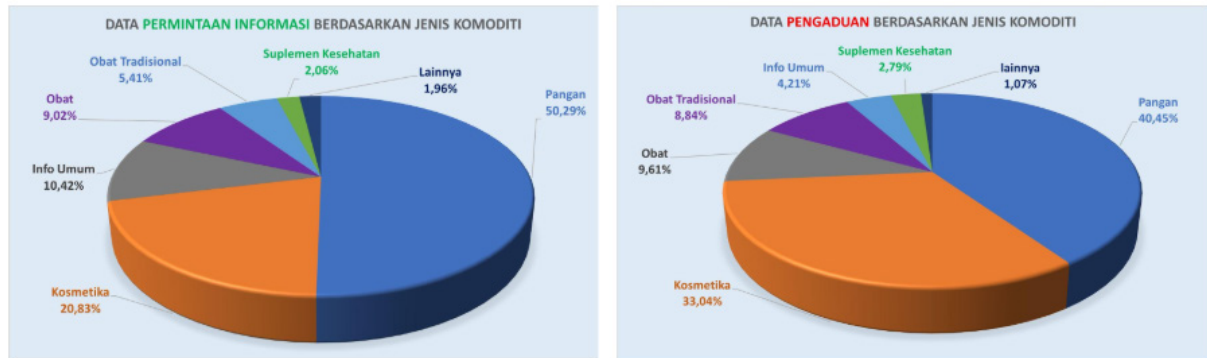
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 25.026 (51,28%) layanan dan karyawan sebanyak 14.856 (30,44%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 665 (39,44%) layanan dan karyawan sebanyak 406 (24,08%) layanan.



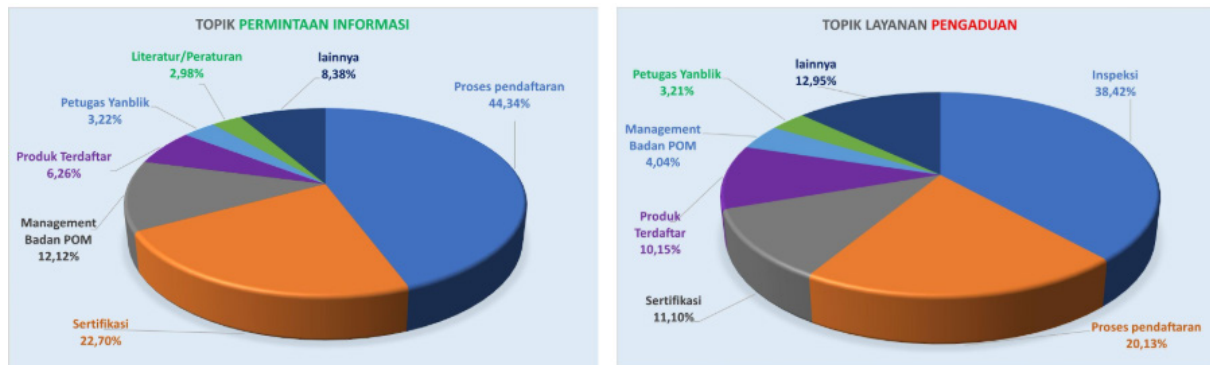
Gambar 24. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu aplikasi *WhatsApp* sebanyak 17.489 (35,84%) layanan dan langsung sebanyak 14.275 (29,25%) layanan, sementara untuk media pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu *WhatsApp* sebanyak 562 (33,33%) layanan dan *email* sebanyak 323 (19,16%) layanan.



Gambar 25. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 24.541 (50,29%) layanan dan kosmetika sebanyak 10.165 (20,83%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 682 (40,45%) layanan dan kosmetika sebanyak 557 (33,04%) layanan.



Gambar 26. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 21.610 (44,34%) layanan dan sertifikasi sebanyak 11.065 (22,70%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, penerimaan ASN di BPOM, informasi ketersediaan

bahan pembanding untuk penelitian, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di Badan POM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi produk sebanyak 647 (38,42%) layanan dan proses pendaftaran seperti *timeline* pendaftaran produk, prosedur pengajuan variasi, dan konfirmasi penyampaian perbaikan sebesar 339 (20,13%) layanan.

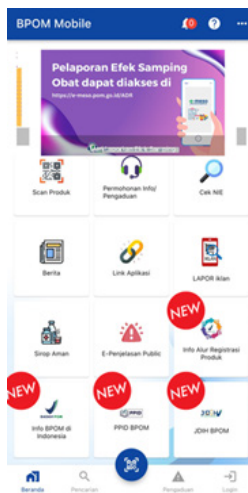


BAB 7

Digitalisasi Pelayanan Publik

1. BPOM Mobile

BPOM *Mobile* merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi Badan POM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi Badan POM, masyarakat dan *stakeholder* dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM *Mobile* juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau *e-government* yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Badan POM. Pada triwulan IV tahun 2024, telah ditambahkan beberapa menu baru yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Selain pembaruan menu, terdapat juga penambahan fitur notifikasi, survei setelah mengakses *e-labeling*, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan. Versi terbaru BPOM Mobile telah tersedia di *Play Store* dan *App Store* sejak 28 Desember 2024.



Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM *Mobile* dimulai sejak tahun 2018. Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile sejak tahun 2018 hingga triwulan IV tahun 2024, aplikasi ini telah diunduh oleh 2.550.970 pengguna dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D *barcode* mencapai 23.708.296 kali, serta menerima 11.848 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari Masyarakat.

Gambar 27. Tampilan BPOM Mobile dengan 4 Menu Baru

2. Aplikasi *Gateway Online Single Submission*

Sistem *Gateway Online Single Submission* (OSS) dan Pajak merupakan penunjang integrasi data antara Badan POM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dengan terintegrasinya aplikasi layanan publik Badan POM dengan OSS RBA, maka BKPM bersama Badan POM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Sebagai dasar penarikan produk beredar yang telah mendapatkan perizinan melalui OSS RBA, Badan POM dan BKPM mengacu ke Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada triwulan IV tahun 2024, Badan POM mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi integrasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (Sistem OSS RBA) dengan Sistem Pelayanan Publik Badan POM yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024. Pada kegiatan ini, dilakukan pembahasan terkait Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Beberapa poin hasil pembahasan sebagai berikut:

- Terdapat penambahan 1 perizinan berusaha pada PB-UMKU Hasil Pra Registrasi Obat untuk mendukung kegiatan usaha/PB-UMKU dengan status uji coba
- NPWP 16 digit sudah diimplementasikan di OSS namun masih menunggu keputusan kapan akan mulai *live*
- Unit teknis di lingkungan Badan POM dapat menghubungi Pusdatin jika ingin menarik data pengajuan di OSS
- Isu dan kendala dalam proses integrasi maupun hak akses dapat disampaikan melalui *whatsapp group* tim teknis untuk ditindaklanjuti oleh tim OSS
- Fitur terkait temuan BPK akan dikembangkan pada pengembangan OSS selanjutnya
- Perlu dilaksanakan diskusi lebih lanjut terkait mekanisme perpanjangan/perubahan izin di OSS

3. Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM *Command Center*

Badan POM *Command Center* (BCC) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. BCC memiliki fungsi untuk mendukung tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik. Adapun kegiatan Pengembangan Data dan Informasi pada BCC yang sudah direalisasikan pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- Reviu *Dashboard* Kedeputan III
- Reviu *Dashboard* Kedeputan IV
- Reviu *Dashboard* Pusat-Pusat
- Bimbingan Teknis Geospasial
- Soft Launching* Aplikasi Badan POM *Command Center* (BCC)
- Kunjungan ke Surabaya *Command Center*

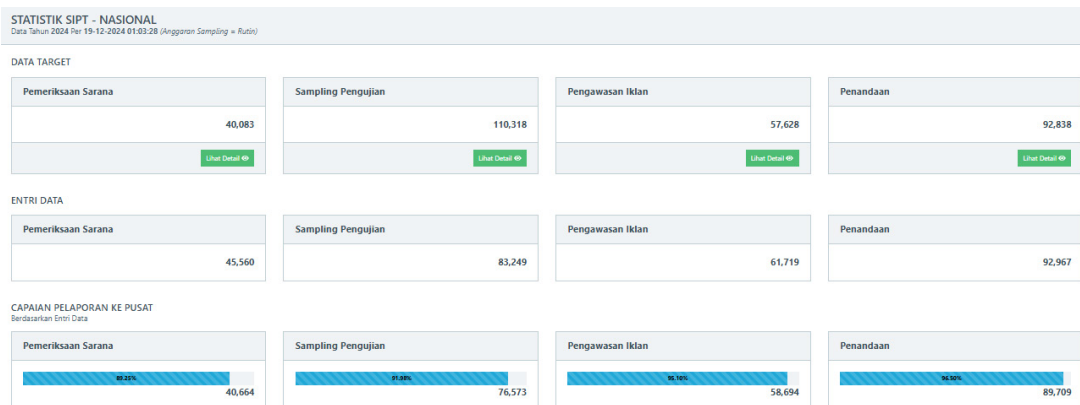
4. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan pengawasan terbaru. Pada triwulan IV telah dilakukan penyempurnaan/pengembangan pada 3 modul yaitu:

- Modul pengawasan iklan dan penandaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan tujuan agar UPT dapat melaporkan hasil kegiatan pengawasan dengan lebih optimal sekaligus menunjang kemudahan dan percepatan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat
- Modul tindak lanjut CAPA yang meliputi hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan keamanan mutu obat yang telah terintegrasi dengan CDOB dan SMARTPOM
- Modul reagensia digunakan untuk pencatatan, dokumentasi dan komunikasi dalam permintaan reagensia di dalam atau antar UPT

Selain itu, Pusdatin juga telah melakukan bimbingan teknis serta *desk consultation* dengan pengguna terutama melalui ITSM untuk membantu menyelesaikan kendala yang terjadi dalam menggunakan aplikasi SIPT. Jumlah total pengaduan terkait SIPT selama triwulan IV tahun 2024 sebanyak 417 keluhan.

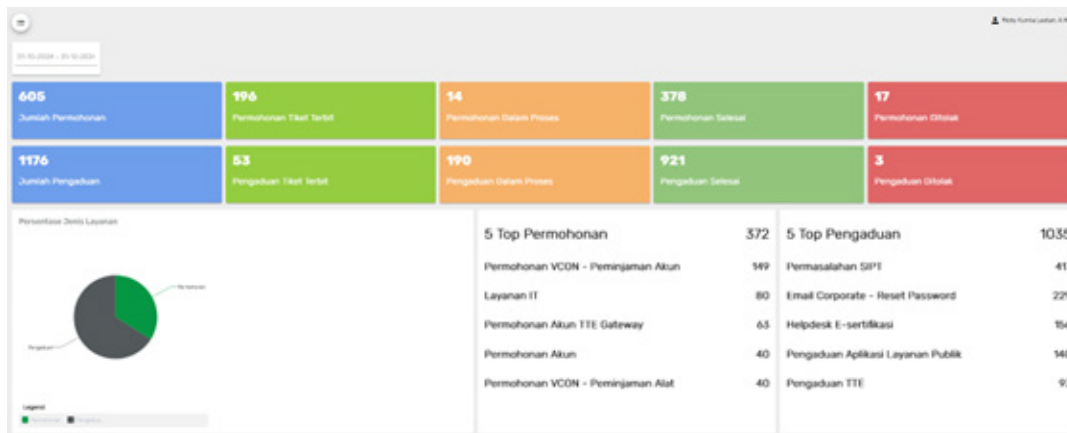
Pengawasan *post-market* Obat dan Makanan senantiasa dilakukan oleh Badan POM dalam upaya memastikan produk Obat dan Makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan jumlah data pengawasan *post-market* Obat dan Makanan yang telah dientri melalui aplikasi SIPT per 19 Desember 2024.



Gambar 28. *Dashboard* Data Pengawasan Obat dan Makanan pada Aplikasi SIPT

5. Layanan Helpdesk Pusdatin

Aplikasi *Help* Pusdatin (ITSM) merupakan aplikasi pengelolaan katalog layanan Pusdatin yang menjadi media komunikasi antara pegawai Badan POM di seluruh Indonesia sebagai pengguna layanan dengan Pusdatin sebagai pengelola layanan. Dalam aplikasi ini terdapat 2 macam layanan yang disediakan yaitu permohonan dan pengaduan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi *Help* Pusdatin pada periode triwulan IV tahun 2024, total pengajuan permohonan dan pengaduan adalah sebanyak 1.781 layanan yang terdiri dari 605 permohonan dan 1.176 pengaduan. Rata-rata waktu tindak lanjut yaitu 2–3 hari untuk permohonan dan 3–4 hari untuk pengaduan.



Gambar 29. Dashboard Data dan Pengaduan pada Layanan Helpdesk Pusdatin

BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, telah ditetapkan 19 Peraturan Badan POM, 70 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 118 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

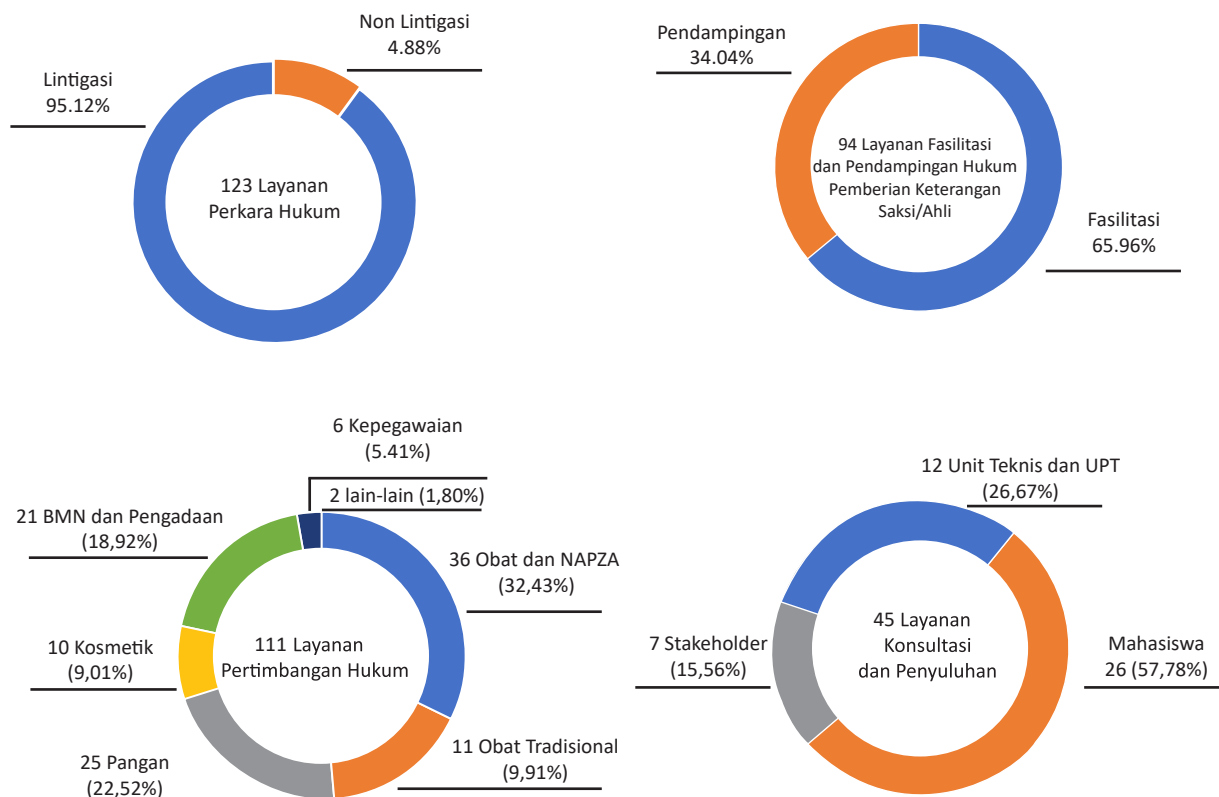


7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan.
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme).
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemarkan dalam Kosmetik.
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit.
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik.
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

2. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yaitu 373 layanan yang terdiri dari:



Gambar 30. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan IV Tahun 2024



BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

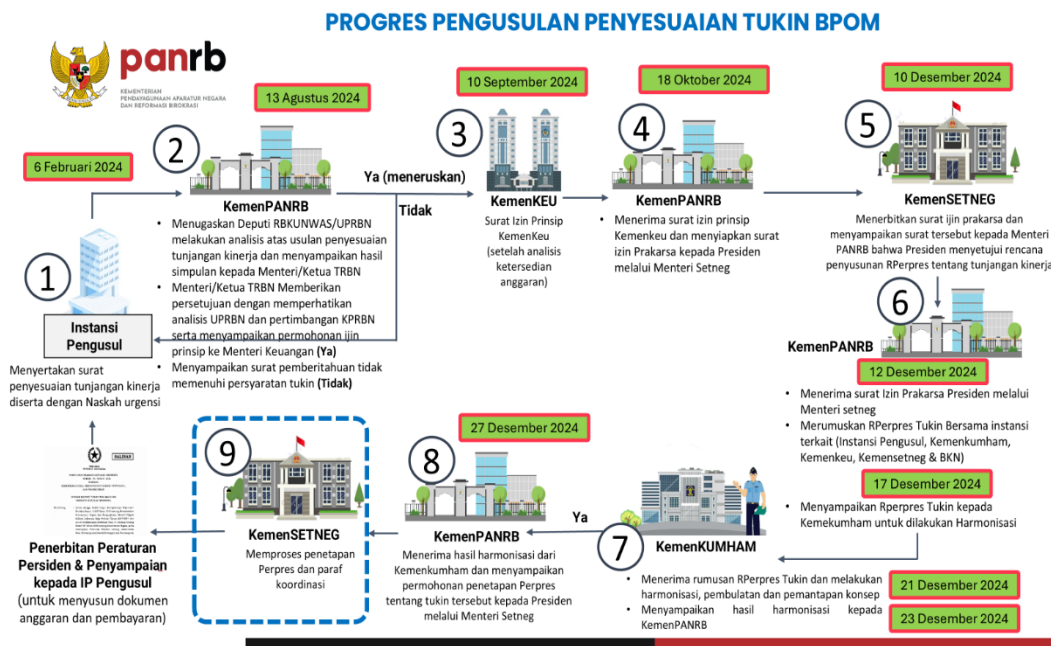
Badan POM melakukan penataan organisasi untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi Badan POM *existing* baik pada organisasi induk maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan, Badan POM telah melakukan penataan kepada UPT di lingkungan Badan POM melalui evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 telah terhadap 76 UPT menggunakan instrumen pada Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada Badan POM. Seluruh data yang digunakan pada evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 bersumber dari Laporan Tahunan UPT Badan POM tahun 2023.

Hasil penataan UPT Badan POM telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/1710/M.KT.01/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peningkatan 11 Loka POM menjadi Balai POM
- b. Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM
- c. Pengubahan lokasi 2 UPT BPOM

2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Proses pengusulan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai BPOM telah mencapai tahap ke-9 dari 9 tahapan, yaitu proses paraf koordinasi Peraturan Presiden. Tahapan ini melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan 3 Kementerian/Lembaga yang melakukan paraf koordinasi, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan POM. Tahap ini menjadi langkah penting menuju penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM oleh Presiden guna mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai Badan POM sebagai upaya memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja organisasi..



Gambar 31. Alur Pengusulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Badan POM

3. Tata Laksana

a. *Exit Meeting* Pelaksanaan Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 Badan POM

Kegiatan *exit meeting* audit ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, *Lead Auditor* PT Sucofindo serta perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja Badan POM secara daring melalui zoom. Pada pertemuan *exit meeting*, PT Sucofindo selaku penyedia jasa Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 tahun anggaran 2024 menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan berupa kesimpulan memperoleh/mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen pada seluruh unit kerja dengan rincian berikut:

- 1) Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu BPOM secara *multi-site* yang meliputi:
 - a) Manajemen puncak dan 29 unit kerja Pusat.
 - b) 21 Balai Besar POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 unit kerja.
 - c) 21 Balai POM dengan jumlah lokus sampel pada 7 unit kerja
 - d) 31 Loka POM di Kabupaten/Kota dengan jumlah lokus sampel pada 11 unit kerja.
- 2) Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- 3) Surat rekomendasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Satuan Kerja Inspektorat Utama, 2 Unit Kerja Pusat dan 17 UPT Balai Besar/Balai POM/Loka POM; dan
- 4) Surat rekomendasi ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Semarang.

b. Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM merupakan evaluasi atas penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan standar sistem manajemen klausul 9.3 *Management Review*, manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu Badan POM tahun 2024 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil *closing meeting* audit eksternal oleh PT Sucofindo pada tanggal 28 November 2024, seluruh unit kerja direkomendasikan untuk memperoleh/mempertahankan sertifikasi

penerapan sistem manajemen. Pada kesempatan ini, Kepala Badan POM selaku Manajemen Puncak menyerahkan secara simbolis sertifikat ISO 9001:2015 BPOM kepada Sekretaris Utama.



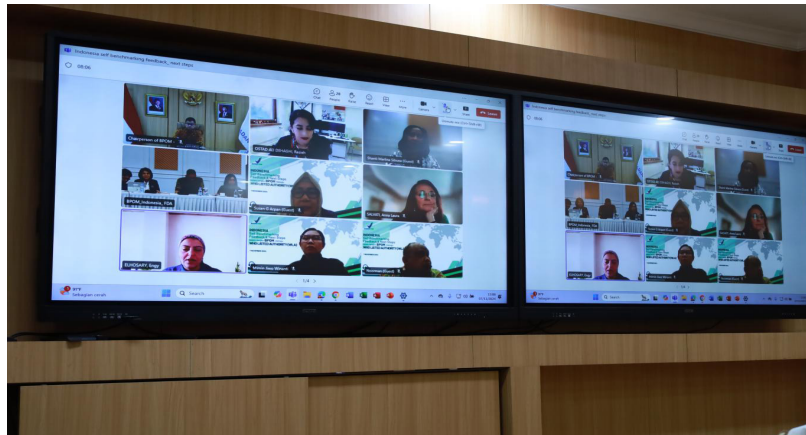
Gambar 32. Kepala Badan POM Selaku Manajemen Puncak Menyerahkan Secara Simbolis Sertifikat ISO 9001:2015 Badan POM kepada Sekretaris Utama



BAB 10

Kerjasama Internasional

1. *Virtual Technical Meeting* dengan *World Health Organization* dalam rangka Pemenuhan Persyaratan WHO *Listed Authority* (WLA) Badan POM



Gambar 33. *Virtual Technical Meeting* antara Badan POM dengan WHO dalam Rangka WLA

Sesuai *roadmap* yang telah disepakati antara Badan POM dan WHO, pada tanggal 7 November 2024 diselenggarakan *virtual technical meeting* untuk membahas hasil penilaian mandiri pemenuhan persyaratan WLA Badan POM. Pertemuan dengan tema “*Indonesia Self Benchmarking Feedback and Next Step* dalam Rangka BPOM Masuk ke Dalam WLA” dibuka dengan *brief address* Kepala Badan POM. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi terhadap hasil reviu WHO terhadap *self assessment* GBT oleh Badan POM. Dari hasil reviu, WHO memerlukan konfirmasi kembali terhadap hasil *self assessment* dari 9 fungsi yang terdapat pada GBT. Setelah pertemuan ini, masih terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati BPOM hingga proses penilaian akhir dan pemberian keputusan.

2. Kolaborasi Badan POM dengan Kementerian BUMN dalam rangka Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing UMKM di Pasar Global

Kepala Badan POM dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan POM pada tanggal 26 November 2024. Nota kesepahaman ini berisi tentang koordinasi tugas dan fungsi kedua lembaga dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang Obat dan Makanan.

Kolaborasi dan komitmen kedua lembaga ini akan mendorong pertumbuhan UMKM pada sektor Obat dan Makanan di Indonesia dan meningkatkan produksi produk dalam negeri. Nota Kesepahaman ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas awal kerja sama ini adalah untuk mempercepat perizinan UMKM sehingga produk yang dipasarkan melalui PaDi UMKM yang umumnya telah mendapatkan pesanan dari berbagai BUMN, pemerintah, dan swasta merupakan produk yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Selain itu, PaDi UMKM diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam mendampingi dan memberikan informasi kepada UMKM mengenai penerapan cara produksi yang baik dan proses perizinan Badan POM yang mudah dan cepat.



Gambar 34. Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan POM dan Kementerian BUMN

BAB 11

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, total pegawai di Badan POM sebanyak 5.339 pegawai dengan penempatan di Pusat sejumlah 1.821 pegawai dan di UPT sejumlah 3.518 pegawai. Demografi pegawai di Badan POM berdasarkan gender terdiri dari 1.514 orang (28,36%) laki-laki dan 3.825 orang (71,64%) perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 2.406 (45,06%) pegawai adalah lulusan S1, 1.427 (26,73%) pegawai lulusan Profesi, 747 (13,99%) pegawai lulusan S2, 597 (11,18%) lulusan Diploma, 21 (0,39%) lulusan S3 dan sisanya 141 (2,64%) lulusan SD/SLTP/SLTA.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung program sertifikasi dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pengelolaan pengetahuan organisasi, serta pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), selama triwulan IV tahun 2024 Badan POM mengelola 8 aplikasi dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sebagai berikut:

a. LSP BPOM

LSP Badan POM selaku unit pelaksana sertifikasi melakukan sertifikasi kompetensi di bidang keamanan pangan bagi Penyuluh Keamanan Pangan Pertama (PKP Pertama) dan Inspektur Muda Keamanan Pangan (*District Food Inspector Junior*) di lingkungan Pemerintah Daerah dan internal Badan POM dengan pelaksanaan menggunakan aplikasi LSP Badan POM (<https://lspbpm.pom.go.id>). Hasil pemanfaatan aplikasi LSP Badan POM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kompeten		Belum Kompeten	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama	532	528	99%	4	1%
2.	Sertifikasi Kompetensi DFI Junior	542	532	98%	10	2%
Total		1.074	1.060	99%	14	1%

b. PENKOMTEK

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi, pemberian umpan balik dan monitoring penggunaan aplikasi penilaian kompetensi teknis (PENKOMTEK) (<https://penkomtek.pom.go.id/>) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No.	Keterangan	Periode	Jumlah Peserta yang diterima	Jumlah Peserta yang ditolak
1.	Pemetaan Kompetensi	Februari	110	0
2.	Uji Kompetensi	Februari	119	18
3.	Pemetaan Kompetensi	Maret	25	0
4.	Pemetaan Kompetensi	Mei	40	0
5.	Uji Kompetensi	Mei	159	7
6.	Pemetaan Kompetensi	Juni	57	0
7.	Pemetaan Kompetensi	Juli	5	0
8.	Pemetaan Kompetensi	Agustus	95	0
9.	Uji Kompetensi	Agustus	121	9
10.	Pemetaan Kompetensi	September	136	0
11.	Uji Kompetensi	November	156	10
12.	Pemetaan Kompetensi	Desember	13	0
Total			1.036	44

c. SIPENATEMANKU

Penilaian kompetensi yang selama ini dilakukan yaitu Uji Kompetensi dan Pemetaan Kompetensi secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta Psikotes Online (SIPENATEMANKU) (<https://asesmen.pom.go.id>). Hasil penilaian kompetensi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
1	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	10 Januari 2024
2	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	5 Februari 2024
3	Pemetaan BBPOM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64	-	29 Januari 2024
		-	13	12 Februari 2024
4	Pemetaan BPOM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53	-	29 Januari 2024
		-	3	19 Maret 2024
5	Pemetaan BPOM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38	-	29 Januari 2024
		-	2	19 Maret 2024
6	Pemetaan Pusat <i>Batch</i> 1	55	-	27 Maret 2024
7	Ukom <i>Batch</i> 1	56	-	23 Februari 2024
		-	20	22-29 Februari 2024
8	Pemetaan BPOM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang	27	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
9	Pemetaan BBPOM di Pekanbaru, Loka POM di Kota Dumai, dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	55	-	28 Mei 2024
		-	8	13-27 Juni 2024
10	Pemetaan BPOM di Mamuju	20	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
11	Ukom April (Pemenuhan data talenta)	2	-	29 April 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
12	Ukom <i>Batch</i> 2	52	-	3 Juni 2024
		-	49	3-7 Juni 2024
13	Pemetaan Balai POM di Kupang, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu, Loka POM di Kab. Sumba Timur, dan Loka POM di Kab. Ende	63	-	5 Agustus 2024
		-	3	11 September 2024
14	Pemetaan Balai POM di Gorontalo	28	-	16 Juli 2024
15	Pemetaan Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, dan Loka POM di Kota Balikpapan	48	-	16 Juli 2024
		-	3	11 September 2024
16	Pemetaan Balai Besar POM di Serang dan Balai POM di Tangerang	58	-	16 Juli 2024
		-	5	11 September 2024
17	Pemetaan Balai POM di Palu & Loka POM di Kab. Banggai	51	-	16 Juli 2024
		-	7	11 September 2024
18	Pemetaan Susulan & PPPK Juli	279	-	30-31 Juli 2024
19	Pemetaan PPPK Agustus	184	-	1 Agustus 2024
20	Ukom <i>Batch</i> 3	58	-	3 September 2024
		-	30	4 September 2024
21	Pemetaan Pusat <i>Batch</i> 4	269		13-14 Novmeber 2024
22	Pemetaan Pusat Tahun 2024 (susulan)	99		18 November 2024
23	Ukom <i>Batch</i> 4	47	30	4 Desember 2024

d. **ERUDITIO**

Badan POM juga menerbitkan jurnal terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia melalui aplikasi ERUDITIO (<https://eruditio.pom.go.id/index.php/home>). Jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2020-2024 berjumlah 8 jurnal dan 52 artikel.

e. **CMC**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, sudah terlaksana kegiatan coaching dan mentoring melalui aplikasi CMC Badan POM (<https://ppsdm.pom.go.id/panel/cmc>). Jumlah kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi CMC s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Kegiatan <i>Coaching</i>	15 Kegiatan	3 Kegiatan	23 Kegiatan	14 Kegiatan
2	Kegiatan <i>Mentoring</i>	9 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan

f. **SIMPHONI**

Badan POM memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau unit kerja di Badan POM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengetahuan organisasi melalui publikasi data/pengetahuan/informasi pada aplikasi SIMPHONI (<https://ppsdm.pom.go.id/simponi>). Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, jumlah total data yang telah dimanfaatkan yaitu sejumlah 408 data.

g. **IDEAS**

Aplikas *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Data monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi IDEAS selama triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai BPOM yang belajar IDEAS	3.944
2	ASN Non BPOM yang belajar IDEAS	224
3	Pelaku usaha yang belajar di IDEAS	103
4	Akun eksternal yang belajar di IDEAS	1.073
5	Modul terbaru yang diupload	55
6	Webinar yang dilaksanakan	53

h. SIASN

Kegiatan perencanaan pengembangan kompetensi Badan POM dapat dimonitoring oleh masing-masing Unit Kerja melalui modul Pengembangan Kompetensi pada <https://siasn.po.go.id>. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi Badan POM yang telah mencapai 20 Jam Pembelajaran (JP) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

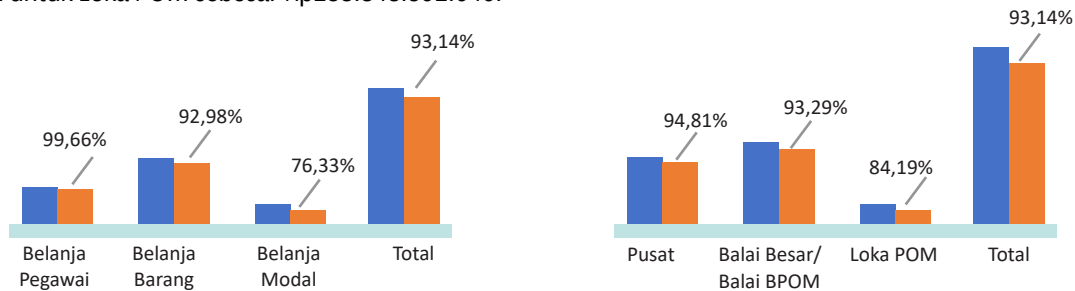
Tabel 9. Hasil Monitoring Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIASN s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Persentase
1.	Pegawai yang mengikuti pelatihan	
	a. Sudah mengikuti	99,99%
	b. Belum mengikuti	0,01%
2.	Pegawai yang mencapai 20 JP pengembangan kompetensi	
	a. Sudah mencapai 20 JP	99,50%
	b. Belum mencapai 20 JP	0,50%

BAB 12

Realisasi Anggaran Sampai dengan Desember 2024

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per Desember tahun 2024 sebesar, Rp2.192.782.718.683 (93,14%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp810.803.231.783 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp1.228.635.895.254, dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp153.343.591.646.



Gambar 35. Realisasi Anggaran s.d Desember 2024

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	855.182.890.000	810.803.231.783	94,81%
Balai Besar/ Balai POM	1.316.993.091.000	1.228.635.895.254	93,29%
Loka POM	182.145.965.000	153.343.591.646	84,19%
Total	2.354.321.946.000	2.192.782.718.683	93,14%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	802.168.468.000	1.252.694.112.000	299.459.366.000	2.354.321.946.000
Realisasi	799.476.921.775	1.164.716.080.588	228.589.716.320	2.192.782.718.683
%	99,66%	92,98%	76,33%	93,14%



BAB 13

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2024. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per bulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Desember tahun 2024 sebagaimana terlampir pada buku ini.



Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.



LAMPIRAN I

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BPOM

S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Pengawasan Obat	91.00	Indeks	92.02	101.12%
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.00	Indeks	89.20	100.23%
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	96.70	%	100.00	103.41%
		Indeks Pengawasan Makanan	86.00	Indeks	89.05	103.55%
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350.00	Kab/Kota	350.00	100.00%
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51.00	%	44.15	86.57%
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94.75	%	94.50	99.74%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86.00	%	90.47	105.20%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91.00	%	91.89	100.98%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	81.50	%	87.82	107.75%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	%	98.90	109.89%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	86.00	Indeks	82.41	95.83%
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92.00	Indeks	88.09	95.75%
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83.00	Indeks	83.97	101.17%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91.29	Indeks	93.47	102.39%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95.00	%	98.18	103.35%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	75.00	%	79.58	106.11%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97.00	%	99.73	102.81%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	70.00	%	69.66	99.51%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71.00	%	77.43	109.06%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.51	Indeks	4.87	107.98%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81.00	%	98.65	121.79%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97.00	Nilai	96.21	99.19%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3424.00	Sekolah	3483.00	101.72%
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1106.00	Desa	1107.00	100.09%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	453.00	Pasar	454.00	100.22%
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	81.00	%	86.09	106.28%
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	91.18	%	91.18	100.00%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	89.93	Indeks	87.92	97.76%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	92.14	Indeks	88.58	96.14%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	98.75	Nilai	99.23	100.49%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	91.00	%	100.00	109.89%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	92.50	%	95.83	103.60%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92.90	%	93.10	100.22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	92.00	%	100.00	108.70%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	3.00	Persen	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.13	Persen	86.56	97.12%
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.35	Persen	84.64	94.73%
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3.00	Jaringan	3.00	100.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.74	Nilai	96.78	102.15%
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	80.00	%	74.83	93.54%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	88.00	%	89.03	101.17%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	88.00	%	89.65	101.88%
		Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	86.00	%	88.46	102.86%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	92.00	%	100.00	108.70%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91.75	Indeks	91.81	100.07%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.90	Indeks	4.93	100.61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.20	Indeks	87.72	95.14%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.09	Indeks	89.09	96.74%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	98.46	100.98%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.50	%	89.42	113.91%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88.00	%	93.87	106.67%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.50	%	99.66	101.18%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.50	%	100.00	101.52%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92.00	%	92.17	100.18%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81.00	%	82.08	101.33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89.00	%	89.10	100.11%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72.00	%	78.57	109.13%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100.00	%	100.00	100.00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87.50	Indeks	93.37	106.71%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.55	Indeks	4.77	104.84%
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90.81	Indeks	87.11	95.93%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92.00	Indeks	91.61	99.58%
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	350.00	Kab/Kota	350.00	100.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	98.46	100.98%
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	95.00	%	96.37	101.44%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72.00	%	73.08	101.50%
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98.30	%	98.26	99.96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95.00	%	94.94	99.94%
		Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	90.00	%	100.00	111.11%
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95.00	%	99.30	104.53%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	25.00	%	28.70	114.80%
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan produksi yang diberikan	94.60	%	95.14	100.57%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	100.00	%	100.00	100.00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87.00	Indeks	87.82	100.94%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	Indeks	4.78	102.80%
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	87.41	Indeks	87.35	99.93%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	93.19	Indeks	91.58	98.27%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.33	Nilai	98.17	101.91%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85.00	%	85.96	101.13%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	%	73.88	105.47%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89.00	%	90.05	101.18%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92.00	%	97.72	106.22%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/ Balai POM/Loka POM	98.00	%	100.00	102.04%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94.00	%	94.16	100.17%
		Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81.00	%	78.18	96.52%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86.00	%	100.00	116.28%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100.00	%	100.00	100.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat,	93.50	%	94.03	100.57%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.65	Indeks	4.94	106.24%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	3.00	%	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	87.21	%	87.07	99.84%
		Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	93.33	%	93.19	99.85%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.94	%	98.46	101.57%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81.00	Indeks	82.18	101.46%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	97.00	%	97.56	100.58%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	95.50	%	96.46	101.01%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	96.00	%	96.17	100.18%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	88.00	%	93.86	106.66%
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	85.00	%	93.00	109.41%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	100.00	%	100.00	100.00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	55.20	Indeks	55.80	101.09%
		Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	93.50	Indeks	75.11	80.33%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.	92.00	Indeks	92.24	100.26%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.70	Indeks	4.87	103.62%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	91.26	Indeks	88.24	96.69%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	95.43	%	93.72	98.21%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60800.00	Label dan Iklan	67160.00	110.46%
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	18300.00	Permohonan	25271.00	138.09%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.68	Nilai	91.11	101.59%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	80.20	%	80.26	100.07%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	88.00	%	96.70	109.89%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78.00	%	75.33	96.58%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93.91	%	98.36	104.74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98.00	%	100.00	102.04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90.00	Indeks	90.57	100.63%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.85	Indeks	4.91	101.24%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90.56	Indeks	86.98	96.05%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91.95	Indeks	86.72	94.31%
		Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Post Market sesuai Standar	350.00	Kab/Kota	363.00	103.71%
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	3000.00	sarana	3053.00	101.77%
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	67000.00	Permohonan	77262.00	115.32%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.25	Nilai	97.58	101.38%
		Persentase Instansi Pemerintah yang berperan aktif dalam Pengawasan Makanan	95.00	%	100.00	105.26%
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	96.50	%	99.81	103.43%
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang baik	87.70	%	95.08	108.42%
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan sesuai Standar	84.10	%	86.00	102.26%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	95.00	%	100.00	105.26%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	91.00	Indeks	93.75	103.02%
		Indeks Pelayanan Publik	4.85	Indeks	4.92	101.44%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	91.22	Indeks	88.53	97.05%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	94.10	Indeks	93.37	99.22%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.75	Nilai	97.74	99.99%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	94.00	%	101.71	108.20%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	80.00	%	80.82	101.03%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85.00	%	85.05	100.06%
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76.00	%	67.88	89.32%
		Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	77.20	%	90.48	117.20%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	85.00	%	92.86	109.25%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100.00	%	100.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	100.00	%	100.00	100.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87.00	Indeks	87.74	100.85%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.90	Indeks	4.96	101.22%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91.50	Indeks	87.56	95.69%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97.00	Indeks	94.85	97.78%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	98.46	100.98%
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95.00	%	97.19	102.31%
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	86.00	%	83.67	97.29%
		Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91.00	%	87.56	96.22%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	99.60	%	100.00	100.40%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100.00	%	92.50	92.50%
1.12	Registrasi Obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	90.75	Indeks	93.83	103.39%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	4.80	Indeks	4.87	101.46%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	92.54	Indeks	89.74	96.97%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	91.30	Indeks	91.11	99.79%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.96	Nilai	98.41	101.50%
		Persen pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	82.00	%	75.99	92.67%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	78.00	%	74.17	95.09%
		Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90.00	%	98.63	109.59%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	90.00	%	94.12	104.58%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100.00	%	100.00	100.00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	89.50	Indeks	90.34	100.94%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4.85	Indeks	4.92	101.44%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74	Indeks	88.16	96.10%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14	Indeks	91.29	98.01%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	98.46	101.98%
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praliniik/liniik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	90.00	%	95.74	106.38%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90.00	%	90.07	100.08%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83.50	%	88.18	105.60%
		Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93.00	%	98.30	105.70%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praliniik/Kliniik dan DIP yang efektif	82.00	%	87.95	107.26%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praliniik/ Kliniik dan DIP yang ditindaklanjuti	90.00	%	95.35	105.94%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100.00	%	100.00	100.00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25	Indeks	91.19	101.04%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.60	Indeks	85.37	99.73%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Indeks	4.93	110.79%
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Indeks	88.57	96.13%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51	Indeks	88.68	96.91%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.70	Nilai	97.41	102.86%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99.00	%	98.00	98.99%
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95.00	%	96.44	101.52%
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100.00	%	100.00	100.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	%	100.00	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89.00	Indeks	90.42	101.60%
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	85.68	Indeks	85.68	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks pelayanan publik di bidang standarisasi pangan olahan	4.90	Indeks	4.90	100.00%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	91.60	Indeks	87.82	95.87%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	86.94	Indeks	89.96	103.47%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	98.46	100.98%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96.00	%	97.14	101.19%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	95.00	%	100.00	105.26%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	92.00	%	95.39	103.68%
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	97.00	%	100.00	103.09%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	100.00	%	100.00	100.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standarisasi ONPPZA	85.50	Indeks	95.37	111.54%
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93.79	Indeks	93.79	100.00%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standarisasi ONPPZA	4.50	Indeks	4.78	106.22%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standarisasi ONPPZA yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	90.35	Indeks	88.69	98.16%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	91.79	Indeks	92.08	100.32%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.80	Nilai	94.37	99.55%
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	95.00	%	96.24	101.31%
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95.50	%	100.00	104.71%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100.00	%	100.00	100.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91.75	Indeks	91.92	100.19%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.90	Indeks	4.96	101.22%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.65	Indeks	87.27	95.22%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.60	Indeks	92.23	99.60%
		Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260.00	Kader/fasilitator	290.00	111.54%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380.00	Kab/Kota	380.00	100.00%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980.00	Kader/fasilitator	1129.00	115.20%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574.00	Pemda	620.00	108.01%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	97.91	100.42%
		Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74.00	%	88.62	119.76%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTF	40.00	%	44.44	111.10%
		Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99.20	%	99.58	100.38%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	90.00	%	90.79	100.88%
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	96.00	%	99.62	103.77%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94.00	%	100.00	106.38%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	96.25	Indeks	96.67	100.44%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.95	Indeks	4.97	100.40%
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	90.79	Indeks	87.65	96.54%
		Indeks RB PPPOMN	91.89	Indeks	91.27	99.33%
		Nilai AKIP PPPOMN	85.25	Nilai	84.52	99.14%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93.23	Nilai	95.80	102.76%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70.00	Nilai	95.00	135.71%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84.00	Nilai	98.43	117.18%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.53	Nilai	98.75	101.25%
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100.00	%	100.28	100.28%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100.00	%	101.47	101.47%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	100.00	%	107.14	107.14%
		Persentase laboratorium Balai Besar / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	91.18	%	91.18	100.00%
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	100.00	%	101.22	101.22%
		Persentase Pemenuhan grand desain penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40.00	%	40.00	100.00%
		Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	87.96	%	89.62	101.89%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	%	54.72	91.20%
		Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.00	%	99.44	101.47%
		Persentase Status Akreditasi	100.00	%	100.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	3.00	%	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86.00	%	87.00	101.16%
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	68.80	%	86.95	126.38%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.24	Nilai	97.69	100.46%
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70.00	%	94.99	135.70%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58.00	%	74.61	128.64%
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	92.00	%	95.89	104.23%
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	70.00	Indeks	70.83	101.19%
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55.00	Indeks	61.11	111.11%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	90.00	Indeks	100.00	111.11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	92.00	%	100.00	108.70%
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.66	Indeks	3.62	98.91%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.45	Indeks	87.27	94.40%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.20	Indeks	86.29	93.59%
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82.76	Nilai	81.58	98.57%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	89.65	Nilai	97.97	109.28%
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	78.80	Nilai	84.85	107.68%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70.00	Nilai	80.00	114.29%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86.00	Nilai	93.99	109.29%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.90	Nilai	95.40	100.53%
		Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	84.50	%	86.80	102.72%
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	98.00	%	98.19	100.19%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	%	85.48	142.47%
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	89.00	%	90.67	101.88%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.75	Indeks	94.01	100.28%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.70	Indeks	4.91	104.47%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.44	Indeks	87.23	95.40%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.20	Indeks	87.07	97.61%
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294.00	Kader/fasilitator	311.00	105.78%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.00	Nilai	98.46	103.64%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	97.11	%	98.39	101.32%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	85.00	%	100.00	117.65%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.50	%	95.45	109.09%
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	91.67	%	94.12	102.67%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.20	%	99.27	100.07%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99.00	%	100.00	101.01%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.50	Indeks	2.75	110.00%
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.90	Indeks	87.42	100.60%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.40	Indeks	82.28	104.95%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.03	Nilai	98.29	103.43%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90.00	%	92.14	102.38%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80.00	%	83.75	104.69%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85.00	%	91.10	107.18%
		Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85.00	%	88.99	104.69%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90.00	%	93.75	104.17%
B.	Program Dukungan Manajemen					
		Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	91.00	Nilai	-	Masih menunggu nilai dari Kementerian PANRB

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4.00	WTP	4.00	100.00%
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	62.25	Nilai	61.35	98.55%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	95.50	Indeks	95.56	100.06%
		Indeks Kepuasan Media	77.13	Indeks	78.37	101.61%
		Indeks Opini Publik BPOM	81.00	Indeks	85.19	105.17%
		Persentase kerja sama yang efektif	90.00	%	90.26	100.29%
		Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4.00	Indeks	4.21	105.25%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3.89	Indeks	3.89	100.00%
		Indeks kepuasan media	77.13	Indeks	78.37	101.61%
		Indeks opini publik BPOM	85.10	Indeks	85.19	100.11%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85.20	Indeks	83.82	98.38%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86.32	Indeks	80.66	93.44%
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2.00	Negara	2.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.41	Nilai	98.98	102.67%
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88.00	%	90.46	102.80%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	%	90.39	100.43%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.86	%	99.96	100.10%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90.00	%	90.13	100.14%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80.00	%	80.00	100.00%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98.60	%	100.00	101.42%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100.00	%	100.00	100.00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3.85	Indeks	3.69	95.84%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3.00	Indeks	2.75	91.67%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.70	Indeks	84.74	95.54%
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	62.25	Nilai	61.00	97.99%
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23	Nilai	86.99	93.31%
		Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.90	Nilai	88.23	96.01%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15	Nilai	98.29	102.23%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	98.46	100.98%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	92.00	%	92.00	100.00%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100.00	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100.00	%	100.00	100.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.85	Indeks	3.93	102.08%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95.50	Indeks	95.56	100.06%
		Indeks Pelayanan Publik	4.95	Indeks	4.91	99.19%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87.71	Indeks	87.63	99.91%
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94.04	Indeks	92.48	98.34%
		Indeks Reformasi Hukum	96.40	Indeks	100.00	103.73%
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3.00	Nilai	3.00	100.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	98.47	101.99%
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4.00	Nilai	4.21	105.28%
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.69	%	99.69	100.00%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	98.00	%	100.00	102.04%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100.00	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	97.00	%	97.06	100.06%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	96.00	%	100.00	104.17%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.50	Indeks	3.58	102.29%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.20	Indeks	3.32	103.75%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	89.12	Indeks	85.93	96.42%
		Indeks RB Biro SDM	92.28	Indeks	87.67	95.00%
		Indeks Sistem Merit	0.95	Indeks	0.97	102.11%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.92	%	99.32	101.43%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	80.00	%	89.79	112.24%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	98.00	%	99.77	101.81%
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	94.00	%	98.42	104.70%
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	80.00	%	94.17	117.71%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100.00	%	100.00	100.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77.00	Indeks	87.90	114.16%
		Indeks Pelayanan Publik	3.35	Indeks	3.98	118.81%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	88.64	Indeks	85.19	96.11%
		Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67.14	Indeks	77.90	116.03%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91.70	Indeks	88.22	96.21%
		Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	1000.00	SDM	1004.00	100.40%
		Nilai AKIP PPSDM POM	80.50	Nilai	79.35	98.57%
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.50	Nilai	4.66	103.56%
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.65	Nilai	4.70	101.08%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91.83	Nilai	94.75	103.18%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70.00	Nilai	85.00	121.43%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88.00	Nilai	90.86	103.25%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	Nilai	99.10	101.64%
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98.95	%	100.00	101.06%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	%	84.14	140.23%
		Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	100.00	%	107.14	107.14%
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65.50	%	60.05	91.68%
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	83.00	%	83.05	100.06%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95.00	%	95.42	100.44%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.60	Indeks	4.81	104.57%
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.50	Indeks	3.51	100.29%
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63	Indeks	86.38	96.37%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.10	Indeks	86.31	100.24%
		Indeks SPBE Badan POM	4.10	Indeks	4.53	110.49%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30.00	Data	36.00	120.00%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84.00	Nilai	81.87	97.46%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25	Nilai	99.37	110.11%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81.00	Nilai	90.00	111.11%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87.00	Nilai	98.64	113.38%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.50	Nilai	96.54	102.16%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100.00	%	111.00	111.00%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.50	%	99.48	100.99%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75.00	%	89.90	119.87%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100.00	%	116.00	116.00%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100.00	%	102.65	102.65%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22	%	74.78	108.03%
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100.00	%	100.88	100.88%
		Sertifikasi ISO 27001	1.00	Sertifikat	1.00	100.00%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.30	Nilai	85.25	98.78%
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	86.00	Nilai	88.43	102.83%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	3.00	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	91.25	%	86.09	94.35%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat I	86.70	%	88.99	102.64%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	20.45	98.55%
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.60	Indeks	3.77	104.72%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	4.094	106.34%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.50	%	98.75	101.28%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	83.98	100.60%
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	99.97	100.97%
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	%	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94.00	%	96.15	102.29%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	96.00	Indeks	93.45	97.34%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30.00	Indeks	50.00	166.67%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	92.00	Indeks	100.00	108.70%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.30	Nilai	84.26	97.64%
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II	86.00	Nilai	88.30	102.67%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3.00	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	94.84	%	87.84	92.62%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	86.70	Indeks	83.80	96.66%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	20.75	100.00%
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.60	%	3.77	104.72%
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	4.09	106.23%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.79	%	100.00	104.40%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	83.98	100.60%
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	99.99	100.99%
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100.00	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00	Indeks	100.00	100.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	Indeks	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94.00	%	96.15	102.29%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96.00	Indeks	87.10	90.73%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30.00	%	62.50	208.33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	92.00	%	75.00	81.52%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.81	Nilai	3.61	94.75%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW IV 2024	Capaian (%)
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90.00	Nilai	92.20	102.44%
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3.42	Indeks	3.59	104.97%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3.00	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	85.90	Persen	85.00	98.95%
		Indeks RB Biro Umum	90.48	Persen	82.97	91.70%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	85.00	Persen	88.25	103.82%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94.00	Level	98.38	104.66%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	98.65	Nilai	99.15	100.51%
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	92.50	Persen	94.10	101.73%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100.00	Indeks	100.00	100.00%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	95.00	Indeks	98.80	104.00%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100.00	Indeks	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100.00	%	100.00	100.00%



LAMPIRAN II



PERINGKAT REALISASI ANGGARAN UNIT PUSAT

No	UnitKerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN	7.181.790.000	6.876.343.000	6.876.336.505	95,747%	99,9999%
2	KOSMETIK	14.943.811.000	13.816.560.000	13.816.529.284	92,457%	99,9998%
3	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT.	12.380.018.000	11.612.651.000	11.612.621.679	93,801%	99,9997%
4	NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.836.110.000	7.363.683.000	7.363.663.449	93,971%	99,9997%
5	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	9.515.134.000	8.844.056.000	8.844.018.805	92,947%	99,9996%
6	INSPEKTORAT II	9.740.929.000	9.184.464.000	9.184.424.788	94,287%	99,9996%
7	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	10.467.862.000	10.039.577.000	10.039.527.804	95,908%	99,9995%
8	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	11.391.066.000		7.676.745.520	73,34%	76,09%
9	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.691.988.000	10.465.241.000	10.465.170.202	91,872%	99,9993%
10	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN	9.183.493.000	8.071.717.000	8.071.564.319	92,862%	99,9981%
11	KOSMETIK	49.258.463.000	9.012.919.000	9.012.743.344	98,141%	99,9981%
12	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN	11.356.263.000	46.727.736.000	46.726.707.079	94,860%	99,9978%
13	ZAT ADIKTIF	11.581.444.000	10.555.153.000	10.554.779.110	92,942%	99,9965%
14	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.892.275.000	11.026.876.000	11.026.477.842	95,208%	99,9964%
15	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	12.180.347.000	7.382.821.000	7.382.175.942	93,537%	99,9913%

No	UnitKerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	DIT. CEGAH TANGKAL	9.629.642.000	9.124.129.000	9.118.960.816	94,697%	99,9434%
17	BIRO KERJASAMA	16.208.512.000	14.557.217.000	14.547.177.527	89,750%	99,9310%
18	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	51.720.013.000	47.979.654.000	47.943.076.334	92,697%	99,9238%
19	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21.662.892.000	20.161.517.000	20.145.154.583	92,994%	99,9188%
20	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	248.837.303.000	247.859.679.000	247.650.499.860	99,523%	99,9156%
21	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.431.110.600	16.370.613.600	16.354.069.329	93,821%	99,8989%
22	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	69.482.408.000	66.152.168.000	66.084.536.502	95,110%	99,8978%
23	INSPEKTORAT I	19.857.121.000	18.564.100.000	18.544.620.677	93,390%	99,8951%
24	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	16.079.354.600	14.501.457.600	14.484.811.660	90,083%	99,8852%
25	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	16.659.116.600	14.976.202.600	14.948.880.808	89,734%	99,8176%
26	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.819.655.000	13.843.605.000	13.817.180.772	93,236%	99,8091%
27	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.064.627.600	7.789.404.600	7.772.509.765	96,378%	99,7831%
28	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.908.669.600	8.555.416.600	8.535.748.163	95,814%	99,7701%
29	BIRO UMUM	123.482.494.000	111.568.100.000	111.266.838.495	90,107%	99,7300%
30	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	18.738.978.000	17.468.905.000	17.412.946.940	92,924%	99,6797%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR/BALAI POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	29.003.431.000	27.850.803.000	27.846.131.732	96,010%	99,9832%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	28.033.787.000	25.439.466.000	25.430.802.173	90,715%	99,9659%
3	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29.490.984.000	28.692.467.000	28.682.043.260	97,257%	99,9637%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	46.154.718.000	43.204.111.000	43.185.304.089	93,566%	99,9565%
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35.242.886.000	34.870.383.000	34.848.715.293	98,882%	99,9379%
6	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BATAM	26.462.674.000	25.535.016.000	25.518.255.377	96,431%	99,9344%
7	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURAKARTA	10.839.975.000	10.671.507.000	10.664.271.577	98,379%	99,9322%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	63.794.354.000	60.776.444.000	60.730.069.850	95,197%	99,9237%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	50.625.276.000	48.729.265.000	48.680.482.932	96,158%	99,8999%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	32.780.358.000	31.627.208.000	31.592.815.393	96,377%	99,8913%
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PANGKAL PINANG	22.178.919.000	20.764.147.000	20.732.455.625	93,478%	99,8474%
12	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26.085.521.000	22.098.646.000	22.062.918.128	84,579%	99,8383%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	64.800.025.000	61.983.852.000	61.870.351.886	95,479%	99,8169%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	24.778.193.000	23.862.938.000	23.817.279.947	96,122%	99,8087%
15	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TANGERANG	10.937.735.000	10.738.714.000	10.717.293.853	97,985%	99,8005%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	35.895.261.000	17.644.182.000	17.608.784.692	49,056%	99,7994%
17	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PAYAKUMBUH	19.432.670.000	18.972.478.000	18.934.192.702	97,435%	99,7982%
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SERANG	31.174.170.000	30.369.465.000	30.298.018.016	97,189%	99,7647%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	41.917.580.000	39.482.134.000	39.379.672.517	93,945%	99,7405%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BOGOR	12.548.251.000	12.369.317.000	12.337.033.774	98,317%	99,7390%
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39.295.334.000	35.479.798.000	35.384.827.859	90,048%	99,7323%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	71.617.386.000	69.651.283.000	69.462.110.269	96,991%	99,7284%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	51.290.546.000	49.913.194.000	49.768.311.106	97,032%	99,7097%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN GORONTALO	20.289.582.000	18.209.673.000	18.153.023.838	89,470%	99,6889%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	33.032.442.000	30.123.839.000	30.019.581.115	90,879%	99,6539%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JEMBER	9.451.298.000	9.193.114.000	9.161.176.227	96,930%	99,6526%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	30.706.163.000	27.114.222.000	27.006.395.014	87,951%	99,6023%
28	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	34.049.827.000	33.796.015.000	33.638.115.731	98,791%	99,5328%
29	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	36.319.634.000	35.604.601.000	35.427.770.602	97,544%	99,5033%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	25.696.633.000	24.878.228.000	24.752.532.843	96,326%	99,4948%
31	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	29.029.899.000	27.238.605.000	27.099.746.842	93,351%	99,4902%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34.886.550.000	32.297.564.000	32.103.807.398	92,023%	99,4001%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
33	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31.129.432.000	29.341.244.000	29.158.418.777	93,668%	99,3769%
34	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALOPO	11.170.364.000	10.831.426.000	10.754.667.668	96,279%	99,2913%
35	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TASIKMALAYA	11.148.401.000	10.884.292.000	10.805.367.787	96,923%	99,2749%
36	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEDIRI	11.534.280.000	11.309.109.000	11.204.070.393	97,137%	99,0712%
37	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TARAKAN	15.320.031.000	13.338.349.000	13.196.354.117	86,138%	98,9354%
38	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	26.863.219.000	26.459.690.000	26.159.515.808	97,380%	98,8655%
39	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	30.572.619.000	29.900.308.000	29.393.023.218	96,142%	98,3034%
40	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	49.286.656.000	45.903.772.000	45.027.676.125	91,359%	98,0915%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN LOKA POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KOTA DUMAI	6.791.731.000	5.868.713.000	5.868.513.628	86,407%	99,9966%
2	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5.226.746.000	5.077.870.000	5.077.430.984	97,143%	99,9914%
3	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	6.921.404.000	6.733.253.000	6.732.448.969	97,270%	99,9881%
4	LOKA POM DI KABUPATEN TABALONG	4.541.627.000	4.424.981.000	4.423.985.459	97,410%	99,9775%
5	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	3.708.723.000	3.586.293.000	3.584.771.485	96,658%	99,9576%
6	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	4.314.101.000	4.171.187.000	4.169.319.363	96,644%	99,9552%
7	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	4.365.997.000	4.202.773.000	4.200.831.865	96,217%	99,9322%
8	LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	4.424.763.000	4.197.930.000	4.195.082.980	94,809%	99,9272%
9	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	6.019.839.000	5.456.106.000	5.452.136.422	90,569%	99,9266%
10	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	13.131.089.000	4.515.281.000	4.511.966.618	34,361%	99,9169%
11	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	4.767.631.000	4.256.229.000	4.252.694.200	89,199%	99,9061%
12	LOKA POM DI ACEH TENGAH	5.062.437.000	4.921.227.000	4.916.605.630	97,119%	99,8994%
13	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	7.491.119.000	6.914.754.000	6.907.797.768	92,213%	99,8558%
14	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	4.713.791.000	4.188.516.000	4.182.474.953	88,728%	99,8557%
15	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.266.999.000	4.159.907.000	4.153.904.650	97,350%	75,85%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	8.306.955.000	7.758.705.000	7.745.440.564	93,240%	99,8290%
17	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	4.157.261.000	3.958.270.000	3.948.204.932	94,971%	99,7457%
18	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	15.985.780.000	4.988.479.000	4.973.376.916	31,111%	99,6973%
19	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5.304.116.000	5.096.985.000	5.080.680.710	95,788%	99,6801%
20	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	5.431.800.000	5.335.406.000	5.317.936.003	97,904%	99,6726%
21	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	5.498.777.000	5.321.249.000	5.302.647.708	96,433%	99,6504%
22	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.377.085.000	4.149.823.000	4.132.992.523	94,423%	99,5944%
23	LOKA POM DI ACEH SELATAN	4.384.266.000	4.217.422.000	4.195.933.881	95,704%	99,4905%
24	LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	4.931.885.000	4.694.485.000	4.661.843.187	94,525%	99,3047%
25	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	6.170.221.000	4.998.744.000	4.961.553.582	80,411%	99,2560%
26	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5.451.264.000	5.264.401.000	5.222.964.506	95,812%	99,2129%
27	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4.497.759.000	4.354.607.000	4.312.425.181	95,879%	99,0313%
28	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	4.195.387.000	4.023.363.000	3.973.675.600	94,715%	98,7650%
29	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4.864.806.000	4.704.998.000	4.644.684.708	95,475%	98,7181%
30	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	6.853.812.000	6.704.146.000	6.549.621.758	95,562%	97,6951%
31	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	5.986.794.000	5.836.108.000	5.689.644.913	95,037%	97,4904%



Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat
10560



021 4244691



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI